

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI
UPAYA PENGEMBANGAN SEKTOR WISATA RELIGI DI KABUPATEN
GRESIK**

Amanda Wulan Apriliya

Profram Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
mndapriya@gmail.com;

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
kenronggo@untag-sby.ac.id;

Dida Rahmadanik

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
didarahma@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Wisata religi di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena menggabungkan nilai-nilai spiritual, sejarah, dan budaya menjadi satu pengalaman perjalanan. Studi ini mengevaluasi kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan publik, termasuk efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Melalui metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan dan kualitas fasilitas wisata religi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kesenjangan dalam distribusi manfaat dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, termasuk program khusus untuk kelompok yang belum mendapat manfaat, audit pengelolaan sumber daya, dan pembentukan mekanisme responsif melalui partisipasi aktif pemangku kepentingan lokal. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan pariwisata religi di wilayah tersebut.

Kata kunci: *Evaluasi, Kebijakan, Wisata Religi*

ABSTRACT

Religious tourism in Indonesia has its own attraction for tourists because it combines spiritual, historical and cultural values into one travel experience. This study evaluates the policy for developing the religious tourism sector in Gresik Regency, East Java, by referring to public policy evaluation criteria, including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, accuracy and responsiveness. Through qualitative research methods, data is collected from primary and secondary sources through observation, interviews and documentation. The research results show that this policy has succeeded in increasing tourist visits and the quality of religious tourism facilities. However, there are still obstacles such as gaps in the distribution of benefits and lack of efficiency in resource management. Recommendations are prepared to increase policy effectiveness, including special programs for groups that have not benefited, audits of resource management, and the establishment of responsive mechanisms through the active participation of local stakeholders. By implementing these recommendations, it is hoped that the policy for developing the religious tourism sector in Gresik Regency can become more effective and have a greater positive impact on the development of religious tourism in the region.

Keywords: *Evaluation, Policy, Religious Tourism*

A. PENDAHULUAN

Wisata religi di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena menggabungkan nilai-nilai spiritual, sejarah, dan budaya menjadi satu pengalaman perjalanan. Indonesia, yang dikenal sebagai negara religius, memiliki potensi besar dalam hal wisata religi karena keindahan alamnya yang beragam dipadukan dengan nilai-nilai spiritual. Banyak orang mencari makna yang lebih dalam dalam hidup mereka, dan perjalanan keagamaan menawarkan kesempatan untuk terhubung dengan nilai-nilai agama. Tempat suci, makam tokoh besar, candi, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya memberikan suasana ketenangan dan kontemplasi, membantu pengunjung menemukan kedamaian batin. Dengan jumlah penduduk umat beragama yang besar, wisata religi menjadi pilihan menarik bagi mereka yang mencari pengalaman lebih dari sekadar liburan biasa.

Salah satu wisata di Jawa Timur yang banyak dikunjungi wisatawan adalah wisata religi nya. Banyak wisata religi di Jawa Timur khususnya wisata religi muslim. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh di masa lalu yaitu penyebaran Agama Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo. Terdapat beberapa makam Wali Songo yang menjadi tujuan ziarah wisatawan.

Kabupaten Gresik kaya akan sejarah Islam dan memiliki banyak makam Wali Songo terkenal, termasuk makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Makam ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang berkelanjutan. Gresik juga memiliki masjid bersejarah dan tempat-tempat religi lain yang penting dalam kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Sejarah panjang Gresik sebagai pusat keagamaan dan warisan budaya Islam telah membuatnya menjadi destinasi yang mendalam dan bermakna bagi para wisatawan yang mencari pengalaman spiritual dan ingin

memahami lebih dalam tentang peran Islam dalam perkembangan wilayah tersebut.

Salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Gresik adalah destinasi wisata religi, seperti Makam Sunan Giri, dan Makam Malik Ibrahim. Potensi pariwisata religi diharapkan dapat berperan sebagai sarana untuk mengembangkan wilayah kota Gresik. Pengembangan sektor pariwisata religi ini telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 5 tahun 2012 Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pariwisata. Fokus dari peraturan tersebut adalah pentingnya mengembangkan usaha pariwisata, melindungi hak-hak wisatawan, serta memberdayakan usaha kecil dan menengah dalam sektor pariwisata.

Namun, pengembangan potensi di objek wisata ini masih menghadapi beberapa kendala yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Kendala tersebut mencakup pengembangan wisata di Kabupaten Gresik yang masih belum optimal meskipun sudah ada peraturan, dan peran serta masyarakat dalam proses pengembangan sektor wisata religi yang masih kurang.. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya komunikasi antar aktor atau stakeholder. Tidak hanya itu Pendapatan daerah dari sektor retribusi wisata religi masih belum mencapai potensi maksimalnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pengunjung wisata religi yang menggunakan kendaraan pribadi, sehingga mereka tidak terkena retribusi yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik.

Dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik sudah mempunyai gambaran dalam meningkatkan peran dan manfaat dari sektor wisata dalam pembangunan perekonomian. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala dalam usaha mengembangkan wisata sektor religi tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn Kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang menyangkut tugas pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas seperti pertahanan, energi, kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan.

Proses Kebijakan Publik

Proses Pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Berikut ini penjelasan proses pengembangan kebijakan Publik yang dikemukakan oleh (Ayuningtyas, 2014) Berikut penjelasan proses pengembangan kebijakan publik yang dikemukakan Ayuningtyas:

- a) Pembuatan Agenda
- b) Formulasi Kebijakan .
- c) Pengadopsian Kebijakan

- d) Pengimplementasian Kebijakan
- e) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn

Evaluasi kebijakan yang diungkap oleh William N. Dunn yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, yaitu, Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, (Dunn, 2003). Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu :

1. Efektivitas (*effectiveness*)
2. Efisiensi (*eficiency*)
3. Kecukupan (*adequacy*)
4. Pemerataan (*equity*)
5. Ketepatan (*appropriateness*)
6. Responsivitas (*responsiveness*)

Kebijakan Pariwisata

Menurut Goeldner dan Ritchie mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi (Anastasia dkk., 2014)

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Kediri khususnya pada makam Sunan Giri dan makam Maulana Malik Ibrahim titik Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi kebijakan dengan kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

evaluasi kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik, kita dapat memberikan analisis terhadap enam elemen evaluasi kebijakan yang disebutkan oleh William Dunn:

1. Efektivitas : Kebijakan ini terbukti efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperbaiki kualitas fasilitas wisata religi. Data dari wawancara menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor pariwisata religi di wilayah tersebut.
2. Efisiensi : Pengelolaan sumber daya dalam pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Gresik terlihat efisien, terutama melalui kerja sama antarlembaga dan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan efisiensi, seperti pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi terus-menerus.
3. Kecukupan : Evaluasi terhadap kecukupan sumber daya menyoroti kesadaran akan penggunaan sumber daya yang efektif dan perlunya kolaborasi dengan masyarakat setempat. Dinas Pariwisata Gresik telah menyadari pentingnya memastikan bahwa sumber daya seperti finansial, tenaga kerja, dan infrastruktur telah dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan strategi yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan wisata religi.
4. Pemerataan : Meskipun kebijakan telah memberikan kontribusi positif dalam mengatasi beberapa masalah, masih ada tantangan dalam mencapai pemerataan manfaat. Distribusi manfaat yang merata di antara berbagai kelompok masyarakat masih perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan dampak positif dari pengembangan sektor wisata religi.
5. Ketepatan: Evaluasi ketepatan menyoroti relevansi, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan atau program yang diterapkan. Kebijakan ini dinilai berhasil dalam mengatasi sebagian besar masalah yang dihadapi, namun masih ada ruang untuk peningkatan guna meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata.
6. Responsivitas: Responsivitas kebijakan pengembangan wisata religi di Kabupaten Gresik dinilai cukup baik, dengan adanya forum diskusi, survei, dan pertemuan untuk mendengarkan pandangan dari berbagai pihak terkait. Namun, masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan responsivitasnya agar lebih efektif dalam menghadapi dinamika dan perubahan yang terjadi.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik menunjukkan beberapa keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam berbagai aspek seperti pemerataan manfaat dan peningkatan responsivitas. Evaluasi kebijakan ini penting untuk memberikan arahan dalam upaya pengembangan sektor pariwisata religi di wilayah tersebut, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Wisata Religi Di Kabupaten Gresik ini sudah dilakukan dengan cukup baik. Kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi positif dalam

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperbaiki kualitas fasilitas wisata religi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi pariwisata religi di wilayah tersebut.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif kebijakan, termasuk kesenjangan dalam distribusi manfaat, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, dan peningkatan responsivitas kebijakan terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik adalah bahwa meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positifnya. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi kesenjangan dalam distribusi manfaat, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, dan peningkatan responsivitas kebijakan. Adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif, sementara pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan peningkatan responsivitas kebijakan menjadi kunci untuk mengoptimalkan hasil dari kebijakan tersebut. Kebijakan pengembangan sektor wisata religi di Kabupaten Gresik telah mencapai beberapa keberhasilan namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan terus melakukan evaluasi serta penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata religi di wilayah tersebut.

Saran

Saran atau Rekomendasi disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi kesenjangan dalam distribusi manfaat, penting untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum mendapat manfaat dari pengembangan sektor wisata religi. Langkah selanjutnya adalah merancang program khusus untuk memperluas akses bagi kelompok tersebut dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, demi memastikan kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan adil.
2. Kedua, dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya, langkah-langkah seperti melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Perlu pula pengembangan mekanisme pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan efektif.
3. Terakhir, dalam meningkatkan responsivitas kebijakan, disarankan untuk membentuk forum atau mekanisme partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan. Selain itu, perlu dibuat sistem umpan balik yang terbuka dan responsif terhadap masukan dari masyarakat dan pelaku industri pariwisata agar kebijakan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan yang berkembang.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan bahwa kebijakan pengembangan sektor wisata religi di

Kabupaten Gresik dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pengembangan pariwisata religi di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, D. (2014). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Prinsip dan Praktik*. Raja Grafindo Persada .
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press.
- Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., Pravira Pangestuti Evaluasi Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik, R., Kebijakan Pembangunan Wisata Religi di Kabupaten Gresik, E., & Pravira Pangestuti, R. (2021). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*. 13, 44–51.
- Ikhsan, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Sinjai*.
- Marbun, V. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DINAS PARIWISATA DALAM*
- Sari, H. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017*, 928–934.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta.